



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 7328-7338

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implikasi Investasi Asing Berdasarkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten

Sanniki Setia Perdani^{1✉}

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: Sanikisetya11@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Investasi merupakan faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, baik nasional maupun daerah. Negara yang berhasil menarik investasi, baik domestik maupun asing, seringkali mengalami peningkatan ekonomi yang signifikan, melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan pengembangan sektor - sektor strategis. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan landasan hukum yang mengatur penanaman modal, termasuk bagi investor asing. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana investasi asing berdasarkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal? Serta Bagaimana implikasi investasi asing di Indonesia terhadap laju pertumbuhan ekonomi masyarakat Daerah Provinsi Banten? Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori hukum pembangunan, Teori Negara kesejahteraan dan Konsep Investasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Sumber data yaitu data primer ditunjang dengan data sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 memberikan aturan yang jelas, termasuk kepastian hukum dan perlakuan setara bagi investor asing dan lokal. Sektor tertentu, seperti pertahanan dan sumber daya alam, dilindungi melalui Daftar Negatif Investasi (DNI). Investasi asing di Banten memberikan dampak besar terhadap pembangunan dan kehidupan masyarakat, terutama dalam penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tantangan dan hambatan perlu di perhatikan agar investasi asing menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Kata Kunci: *Investasi Asing, Pertumbuhan Ekonomi, Undang-undang.*

Abstract

Investment is a key factor in driving economic growth in a region, both nationally and regionally. Countries that successfully attract investment, both domestic and foreign, often experience significant economic growth, through job creation and the development of strategic sectors. Law Number 25 of 2007 concerning Investment provides a legal basis that regulates investment, including for foreign investors. The identification of problems in this study is How is foreign investment based on Law Number 25 of 2007 concerning Investment? And What are the implications of foreign investment in Indonesia for the rate of economic growth of the Banten Province community? The theories used in this study are the Theory of Development Law, the Theory of the Welfare State and the Concept of Investment. The research methods used are the Normative Juridical and Empirical Juridical methods. The data sources are primary data supported by secondary and tertiary data. Data collection techniques are carried out by library research and field research. The data obtained are analyzed descriptively with a qualitative data analysis approach. The results of this study indicate that Law Number 25 of 2007 provides clear regulations, including legal certainty and equal treatment for foreign and local investors. Certain sectors, such as defense and natural resources, are protected through the Negative Investment List (DNI). Foreign investment in Banten has a major impact on development and people's lives, especially in job creation, infrastructure development, and increasing Local Revenue (PAD). Challenges and obstacles need to be considered so that foreign investment is beneficial for both parties..

Keywords: *Foreign Investment, Economic Growth, Law*

PENDAHULUAN

Investasi asing memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Investasi, baik dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas produksi, serta transfer teknologi yang mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Untuk mengatur penanaman modal, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagai kerangka hukum yang memberikan kepastian bagi investor, baik domestik maupun asing.

Provinsi Banten, sebagai salah satu wilayah strategis di Indonesia, memiliki potensi besar dalam menarik investasi asing. Letaknya yang dekat dengan DKI Jakarta, infrastruktur seperti pelabuhan internasional, dan keberadaan kawasan industri menjadikannya sebagai tujuan investasi yang potensial. Selain itu, Banten memiliki sumber daya alam yang melimpah, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, hingga perikanan. Potensi ini diharapkan dapat mendongkrak perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.

Namun, implementasi investasi asing di Banten tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu permasalahan utama adalah ketidakmerataan distribusi manfaat investasi. Investasi asing sering kali terkonsentrasi pada sektor industri besar, sedangkan sektor ekonomi rakyat seperti UMKM belum sepenuhnya merasakan dampaknya. Hal ini berpotensi menimbulkan kesenjangan ekonomi dan sosial di tingkat lokal. Selain itu, kualitas sumber daya manusia (SDM) di Banten masih belum optimal. Rendahnya keterampilan tenaga kerja lokal menyebabkan persaingan yang tidak seimbang dengan tenaga kerja asing, sehingga lapangan kerja yang tercipta justru lebih banyak diisi oleh pekerja asing.

Dengan demikian, Provinsi Banten memerlukan kebijakan yang lebih terarah dalam mengelola investasi asing. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa investasi yang masuk tidak hanya menguntungkan investor, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal. Langkah ini dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM, mendorong kemitraan antara investor asing dan pelaku usaha lokal, serta memastikan bahwa investasi asing mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi investasi asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan peraturan pendukung lainnya. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis peraturan hukum serta implementasinya dalam kegiatan investasi asing di Provinsi Banten.[4] Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan, seperti wawancara dengan pihak terkait, termasuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Banten. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dan jurnal ilmiah.[5]. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif, dengan pendekatan induktif untuk menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang ada di lapangan.[6]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Investasi asing memegang peranan penting dalam menggerakkan perekonomian nasional dan daerah. Investasi yang masuk tidak hanya membawa modal, tetapi juga membuka peluang kerja, memperluas infrastruktur, dan mentransfer teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat setempat (Sulistiawati, 2012). Dalam konteks Indonesia, keberadaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjadi landasan hukum untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, termasuk bagi investor asing. Provinsi Banten, dengan posisinya yang strategis sebagai wilayah penyangga ibu kota dan keberadaan infrastruktur seperti pelabuhan internasional, menjadi magnet investasi, baik domestik maupun asing. Potensi ekonomi Banten terlihat dari sektor manufaktur, agrikultur, dan pertanian, yang menjadi sektor andalan untuk menyerap investasi asing. Namun, investasi asing juga memiliki tantangan, termasuk distribusi manfaat ekonomi yang merata dan dampak pada tenaga kerja lokal. Penelitian ini membahas bagaimana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 diimplementasikan di Provinsi Banten, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, serta tantangan yang dihadapi dalam menciptakan keadilan ekonomi bagi masyarakat setempat.

A. Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan oleh investor asing. Salah satu keunggulan utama dari regulasi ini adalah adanya kesetaraan perlakuan antara investor domestik dan asing, yang menjamin bahwa setiap penanam modal memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi. Investasi asing juga dilindungi melalui regulasi yang jelas mengenai Daftar Negatif Investasi (DNI), yang mencakup sektor-sektor tertentu seperti pertahanan dan sumber daya alam yang dilarang atau dibatasi bagi investor asing. Di luar sektor ini, investor asing memiliki kebebasan untuk menanam modal dengan jaminan perlindungan hukum dari pemerintah pusat maupun daerah. Namun, tantangan implementasi regulasi ini terletak pada aspek harmonisasi antara kebijakan pusat dan daerah. Beberapa peraturan daerah di Banten masih dianggap tumpang tindih dengan kebijakan nasional, yang menyebabkan ketidakpastian bagi investor asing dalam menjalankan bisnis mereka. Investor asing diperlakukan sama dengan investor dalam negeri. Tidak ada diskriminasi terhadap penanam modal asing dalam mendapatkan izin usaha, fasilitas investasi, serta dalam menjalankan bisnis di Indonesia.[7] Secara keseluruhan, dengan prinsip keterbukaan dan non-diskriminasi yang diatur oleh Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007, Indonesia diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi asing yang akan memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi, menciptakan lapangan kerja,

dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Selain itu, kebijakan ini menjadi langkah penting untuk menjaga keseimbangan antara keterbukaan terhadap investasi asing meskipun kami ingin agar investor asing datang dan menanamkan modalnya di Indonesia, kami juga harus memastikan bahwa Indonesia tetap bisa menjaga kepentingan dan sumber daya alamnya.

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 memberikan perlindungan hukum kepada investor asing yang berinvestasi di Indonesia. Perlindungan ini bertujuan agar investor asing merasa aman dan nyaman berinvestasi di negara ini. Pemerintah Indonesia menjamin bahwa aset milik investor asing tidak akan diambil begitu saja tanpa ada kompensasi yang adil. Artinya, jika suatu saat pemerintah perlu mengambil sesuatu yang dimiliki investor, mereka harus memberikan pembayaran yang sesuai dengan nilai aset tersebut. Selain itu, investor asing diberikan hak untuk mengirimkan keuntungan mereka kembali ke negara asal mereka dalam bentuk mata uang asing. Jadi, mereka bisa membawa pulang keuntungan yang mereka dapatkan dari usaha yang mereka jalankan di Indonesia. Investor asing juga bisa memiliki saham di perusahaan yang ada di Indonesia, selama mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, artinya mereka dapat menjadi bagian dari perusahaan yang ada di Indonesia dan memperoleh keuntungan dari investasi mereka. Dengan adanya perlindungan hukum seperti ini, investor asing akan merasa lebih aman karena hak - hak mereka terlindungi.

Perlindungan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi investor asing, sehingga mereka merasa yakin bahwa investasi mereka tidak akan terganggu oleh kebijakan sepihak pemerintah. Jaminan ini menjadi daya tarik utama bagi investor asing untuk berinvestasi di Indonesia, karena mereka merasa lebih aman terhadap risiko ketidakpastian hukum.[8] Investor asing yang ingin berinvestasi di Indonesia tidak hanya mendapatkan fasilitas dan kemudahan, tetapi juga harus mengikuti aturan yang ada. Berikut beberapa kewajiban utama :

a. Mematuhi Hukum Lokal

Investor asing harus mengikuti semua aturan yang berlaku di Indonesia. Misalnya, aturan tentang tenaga kerja, perlindungan lingkungan, dan persyaratan teknis lainnya. Jadi, mereka tidak bisa sembarangan beroperasi tanpa mematuhi aturan tersebut.

b. Penggunaan Tenaga Kerja Lokal

Untuk membantu meningkatkan kemampuan pekerja Indonesia, investor asing diwajibkan mempekerjakan orang Indonesia dalam jumlah tertentu. Selain itu,

mereka juga diharapkan memberikan pelatihan supaya pekerja lokal jadi lebih ahli.

c. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

Investor asing juga harus membantu masyarakat di sekitar tempat mereka beroperasi. Caranya bisa dengan mendukung program pembangunan, seperti memperbaiki fasilitas umum, memberikan bantuan pendidikan, atau proyek lain yang bermanfaat bagi masyarakat setempat.

Pemerintah Indonesia memberikan berbagai insentif fiskal dan non-fiskal untuk menarik investasi asing, seperti pembebasan pajak penghasilan melalui tax holiday dan pengurangan bea masuk untuk barang modal (Perpres No. 10/2021 tentang Daftar Prioritas Investasi). Provinsi Banten, yang mengandalkan sektor industri dan agrikultur, telah memanfaatkan kebijakan ini untuk meningkatkan daya tarik ekonominya. Salah satu sektor prioritas yang menjadi andalan Banten adalah sektor manufaktur. Dengan adanya infrastruktur seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan pelabuhan internasional, Banten menjadi tujuan utama investasi asing di Indonesia.

B. Implikasi Ekonomi Investasi Asing di Provinsi Banten

Investasi asing membawa dampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja di Provinsi Banten. Data menunjukkan bahwa setiap investasi baru di sektor manufaktur membutuhkan tenaga kerja tambahan, yang memberikan peluang bagi masyarakat lokal untuk mendapatkan pekerjaan. Namun, tantangan muncul dalam bentuk keberadaan tenaga kerja asing yang masuk melalui perusahaan-perusahaan multinasional. Hal ini memicu persaingan dengan tenaga kerja lokal, yang terkadang tidak memiliki keterampilan yang setara untuk bersaing di pasar tenaga kerja global. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan keterampilan tenaga kerja lokal menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan masyarakat setempat dapat memanfaatkan peluang kerja yang dihasilkan oleh investasi asing. Adapun implikasi investasi asing di Indonesia terhadap laju pertumbuhan ekonomi masyarakat daerah Provinsi Banten diantaranya adalah:

a. Penciptaan lapangan Kerja

Investasi, baik asing maupun domestik, memiliki peran signifikan dalam menciptakan lapangan kerja di Provinsi Banten. Sebagai salah satu provinsi penyangga ibu kota dan pusat industri di Indonesia, Banten menjadi lokasi strategis bagi investor untuk menanamkan modalnya, terutama di sektor manufaktur, infrastruktur, dan logistik. Peningkatan investasi ini telah memberikan peluang kerja baru bagi masyarakat setempat, meskipun tantangan dalam pelaksanaannya masih

ada. Investasi asing dan domestik di Banten telah meningkatkan kebutuhan akan tenaga kerja di berbagai sektor industri. Contohnya, kawasan industri di Tangerang, Cilegon, dan Serang merupakan pusat aktivitas ekonomi yang menciptakan ribuan lapangan kerja setiap tahunnya. Sektor manufaktur, seperti industri baja, petrokimia, tekstil, dan elektronik, menjadi kontributor terbesar dalam menyerap tenaga kerja lokal. Lapangan Kerja di Sektor Infrastruktur Proyek-proyek infrastruktur yang didanai oleh investasi asing, seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan bandara, juga berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja sementara maupun permanen. Misalnya, proyek pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing yang melibatkan modal asing tidak hanya menyerap pekerja konstruksi, tetapi juga membuka peluang kerja baru di bidang logistik dan transportasi setelah infrastruktur tersebut beroperasi

b. Pembangunan Infrastruktur

Investasi asing memainkan peran penting dalam pembangunan infrastruktur, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Di Provinsi Banten, kontribusi investasi asing sangat terasa dalam berbagai proyek infrastruktur, mulai dari pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, hingga fasilitas energi dan telekomunikasi. Infrastruktur yang baik menjadi dasar bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat karena memfasilitasi pergerakan barang, jasa, dan manusia, sehingga mendorong produktivitas dan efisiensi. Infrastruktur yang baik meningkatkan efisiensi logistik, yang penting untuk pertumbuhan ekonomi.

c. Kualitas Hidup

Pembangunan infrastruktur di Banten yang didorong oleh investasi asing telah memberikan dampak positif terhadap kualitas hidup masyarakat di provinsi Banten. Berikut beberapa contoh konkret bagaimana investasi asing dalam pembangunan infrastruktur telah meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Banten

d. Peningkatan Pendapatan Daerah

Investasi asing memainkan peran penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai mekanisme, termasuk kontribusi pajak. Di Provinsi Banten, investasi asing dalam sektor - sektor strategis seperti infrastruktur, manufaktur, dan pariwisata berkontribusi signifikan pada pendapatan daerah. Berikut adalah beberapa cara investasi asing meningkatkan PAD melalui pajak. Perusahaan asing yang berinvestasi di Banten wajib membayar pajak atas pendapatan yang mereka hasilkan di Indonesia. Pajak penghasilan badan (PPh Badan) dari perusahaan asing ini secara langsung meningkatkan pendapatan pajak

yang diterima pemerintah pusat, yang kemudian sebagian dialokasikan kembali ke daerah, termasuk Banten, sebagai bagian dari Dana Bagi Hasil (DBH). Banyak perusahaan asing yang beroperasi di kawasan industri Cilegon, seperti di sektor baja dan petrokimia, menghasilkan pendapatan signifikan bagi pemerintah melalui pembayaran PPh Badan. Pajak yang dikumpulkan dari sektor ini mendukung peningkatan PAD secara tidak langsung melalui mekanisme DBH.

e. Kontribusi dari Infrastruktur yang Dibangun oleh Investasi Asing

Infrastruktur yang dibangun melalui investasi asing, seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara, juga mendukung peningkatan PAD. Infrastruktur ini memungkinkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi lokal yang berdampak pada pengumpulan pajak yang lebih tinggi, baik dari bisnis lokal maupun asing yang memanfaatkan infrastruktur tersebut. Sebagai contoh adalah Jalan Tol Serang – Panimbang. Jalan tol ini, yang sebagian didanai oleh investasi asing, meningkatkan mobilitas dan konektivitas antarwilayah di Banten. Hal ini mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan perdagangan di Banten, yang pada gilirannya meningkatkan penerimaan pajak dari aktivitas bisnis yang berkembang.

f. Sektor Perdagangan dan Ekspor – Impor

Investasi asing juga berperan dalam mendorong ekspor - impor melalui pelabuhan dan infrastruktur yang dibangun di Banten. Kegiatan perdagangan internasional ini dikenakan berbagai jenis pajak dan bea, yang juga berkontribusi pada pendapatan daerah secara tidak langsung. Aktivitas ekspor - impor yang meningkat melalui pelabuhan di Banten, seperti Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Bojonegara, menghasilkan pendapatan melalui pajak dan retribusi yang terkait dengan kegiatan perdagangan dan logistik. Investasi asing di Banten memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan PAD melalui berbagai mekanisme pajak, seperti PPh Badan, pajak daerah (hotel, restoran, hiburan), PPN, serta retribusi daerah. Selain itu, pembangunan infrastruktur dan peningkatan aktivitas ekonomi lokal yang dihasilkan dari investasi asing juga memperluas basis pajak, yang mendukung peningkatan PAD Provinsi Banten secara berkelanjutan.

g. Pembangunan Sosial

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan dari investasi asing memungkinkan pemerintah daerah Banten untuk meningkatkan berbagai layanan publik yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya kontribusi pajak dari perusahaan asing, pemerintah daerah dapat menggunakan dana tersebut untuk memperkuat infrastruktur dan layanan dasar, meningkatkan kualitas

hidup masyarakat, dan mendorong pembangunan yang lebih inklusif.

h. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Investasi asing dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Banten telah memainkan peran penting dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan daya saing daerah. Melalui berbagai program pelatihan, transfer teknologi, serta pengembangan pendidikan vokasional dan keterampilan, investasi asing memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat kapasitas SDM di provinsi ini. Banyak perusahaan asing yang berinvestasi di sektor industri di Banten, seperti manufaktur, baja, dan petrokimia, turut berperan dalam memberikan pelatihan kepada tenaga kerja lokal. Perusahaan asing biasanya menerapkan standar dan teknologi internasional, sehingga tenaga kerja lokal mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru yang sesuai dengan standar global. Perusahaan asing di sektor baja dan petrokimia di Cilegon, seperti PT Krakatau Posco (kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan), secara aktif melibatkan tenaga kerja lokal dan memberikan pelatihan dalam teknologi pengolahan baja dan manajemen pabrik. Program pelatihan ini meningkatkan keterampilan teknis dan profesional tenaga kerja lokal, yang pada akhirnya memperkuat kemampuan mereka untuk bersaing di pasar kerja yang lebih luas.

Masuknya investasi asing juga mendorong pembangunan infrastruktur di Provinsi Banten. Contohnya adalah pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan kawasan industri yang didanai oleh modal asing. Infrastruktur ini tidak hanya mempermudah aktivitas ekonomi, tetapi juga meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas umum seperti transportasi dan utilitas dasar. Namun, ada kritik bahwa pembangunan infrastruktur sering kali mengabaikan aspek lingkungan dan kebutuhan masyarakat lokal. Dalam beberapa kasus, pembangunan infrastruktur besar menyebabkan dampak sosial, seperti relokasi masyarakat tanpa kompensasi yang memadai.

Investasi asing memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Banten. Melalui pajak perusahaan, retribusi, dan kontribusi lainnya, pemerintah daerah memperoleh pendapatan tambahan yang dapat digunakan untuk membiayai program-program pembangunan. Namun, pengelolaan PAD dari sektor investasi asing masih menghadapi tantangan, seperti transparansi penggunaan anggaran dan distribusi manfaat ekonomi kepada masyarakat. Beberapa pihak mengkritik bahwa pendapatan dari sektor ini sering kali hanya dinikmati oleh segelintir kelompok elit, sementara masyarakat miskin di pedesaan tidak merasakan dampaknya.

SIMPULAN

Implikasi investasi asing di Indonesia terhadap laju pertumbuhan ekonomi masyarakat Daerah Provinsi Banten, Investasi asing di Banten memberikan dampak besar terhadap pembangunan dan kehidupan masyarakat, terutama dalam penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tantangan seperti kesenjangan keterampilan antara kebutuhan perusahaan asing dan kualitas tenaga kerja lokal, keterbatasan fasilitas pendidikan dan pelatihan, serta masalah perbedaan budaya dan bahasa yang menghambat pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal. Beberapa perusahaan asing juga lebih memilih mempekerjakan tenaga kerja asing daripada melatih pekerja lokal, memperlambat transfer teknologi dan pengembangan kapasitas lokal. Ketergantungan pada investasi asing membawa risiko seperti kerentanan ekonomi akibat keputusan bisnis yang diambil di luar negeri dan ketidakmerataan pembangunan antara daerah. Persaingan yang ketat dengan bisnis lokal, serta risiko eksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang, juga menjadi tantangan. Oleh karena itu, pengelolaan investasi asing harus diperhatikan untuk memastikan manfaat yang berkelanjutan, merata, serta menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Salah satu isu utama yang dihadapi oleh Provinsi Banten adalah kesenjangan distribusi manfaat ekonomi dari investasi asing. Sementara kota-kota besar seperti Tangerang dan Serang menikmati pembangunan ekonomi yang pesat, daerah pedesaan sering kali tertinggal. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kebijakan redistribusi ekonomi yang memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil, mendapatkan manfaat dari investasi asing. Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) juga dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan di daerah pedesaan.

Kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi tantangan besar dalam menarik investasi asing. Sebagian besar tenaga kerja lokal di Banten masih memiliki keterampilan yang terbatas, yang membuat mereka sulit bersaing dengan tenaga kerja asing. Rekomendasi utama adalah meningkatkan program pendidikan dan pelatihan vokasi di sektor-sektor yang menjadi fokus investasi asing. Pemerintah daerah juga perlu bekerja sama dengan perusahaan asing untuk menyediakan pelatihan kerja bagi masyarakat lokal.

Investasi asing di Provinsi Banten memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan PAD. Namun, berbagai tantangan masih perlu diatasi, termasuk kesenjangan distribusi manfaat ekonomi dan rendahnya kualitas

SDM lokal. Dengan strategi yang tepat, Provinsi Banten memiliki potensi besar untuk menjadi pusat investasi asing yang berkelanjutan dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung, 2002.
- Bambang Djajaatmadja, *Negara Kesejahteraan dan Konstitusi Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008.
- Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, BPFE, Yogyakarta, 2003.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Ramadhan & Fikri, *Penanaman Modal Asing dan Kontribusinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Vol 35, No. 3, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 2020): 4
- Rahmadani, *Pengaruh Regulasi Penanaman Modal Asing Terhadap Daya Saing Ekonomi Indonesia di ASEAN*, Vol 45, No. 2, Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis,